

## **THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN ADDRESSING MARKET FAILURE: BETWEEN REGULATION AND POLICY INNOVATION**

### **PERAN ADMINISTRASI PUBLIK DALAM MENGATASI KEGAGALAN PASAR ANTARA REGULASI DAN INOVASI KEBIJAKAN**

Tri Wahyuni Novianti<sup>1</sup>

Tursina Megawari<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, Indonesia

\*Email: [tursinamegawari@gmail.com](mailto:tursinamegawari@gmail.com)

#### **Abstract**

*This study aims to analyze the role of public administration in addressing market failures in Indonesia, with a particular emphasis on balancing regulation and policy innovation. Market failure occurs when market mechanisms fail to deliver goods and services efficiently, equitably, and sustainably, as reflected in monopolies, externalities, information asymmetry, and the under-provision of public goods. This research adopts a descriptive qualitative approach based on a literature review and official government documents, focusing on regulatory dynamics and policy innovation in strategic public sectors. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, with source triangulation drawn from government reports, Statistics Indonesia (BPS), and academic publications. The findings indicate that public administration performs a dual role: as a regulator ensuring legal certainty and public protection, and as a policy innovator capable of adapting to social, economic, and technological changes. However, several structural, administrative, and social barriers persist, including weak inter-agency coordination, limited bureaucratic capacity, and societal resistance to new policies. To address these challenges, key strategies include strengthening bureaucratic capacity, promoting evidence-based policymaking, implementing adaptive public communication, and enhancing cross-sector collaboration through co-production and collaborative governance. This study contributes to the public administration literature by demonstrating that a balanced integration of regulation and policy innovation is essential for effective state intervention in market failures and for advancing inclusive and sustainable development.*

**Keywords:** *public administration; market failure; regulation; policy innovation; governance; inclusive development*

*Article history: Submission Date: November 11, 2025 Revised Date: January 17, 2026 Accepted Date: April 28, 2026*

---

#### **PENDAHULUAN**

Perekonomian modern pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari dinamika interaksi antara negara, pasar, dan masyarakat. Pasar sebagai mekanisme alokasi sumber daya dianggap mampu menciptakan efisiensi, tetapi dalam

kenyataannya sering kali gagal memenuhi fungsi distributif maupun korektifnya. Fenomena ini dikenal dengan istilah kegagalan pasar (*market failure*), yang menurut teori ekonomi publik terjadi ketika mekanisme pasar tidak mampu menyediakan barang dan jasa secara adil, efisien, atau berkelanjutan. Bentuk-bentuk kegagalan pasar dapat berupa monopoli dan oligopoli, eksternalitas negatif, asimetri informasi, hingga ketidakmampuan pasar dalam menyediakan barang publik yang esensial (Musgrave & Musgrave, 1989).

Dalam konteks global, banyak negara mengandalkan peran negara melalui administrasi publik untuk mengatasi kegagalan pasar. Administrasi publik hadir bukan sekadar sebagai pengatur, tetapi juga sebagai aktor strategis yang memastikan terciptanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di negara-negara maju, keberhasilan intervensi negara terlihat dari konsistensi investasi pada riset dan pengembangan (*research and development*), pembangunan infrastruktur teknologi, serta regulasi yang adaptif terhadap dinamika inovasi (Stiglitz, 2000). Dengan demikian, administrasi publik berfungsi sebagai penghubung antara sektor negara, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif (Denhardt & Denhardt, 2015; Osborne & Gaebler, 1992; Rhodes, 1997).

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, menghadapi tantangan kegagalan pasar yang cukup kompleks. Ketimpangan akses teknologi digital antara perkotaan dan perdesaan, rendahnya literasi digital masyarakat, serta minimnya investasi riset menjadi faktor utama yang memperkuat kegagalan pasar. Saat ini, alokasi anggaran riset Indonesia baru mencapai 0,08% dari PDB, masih tertinggal dibanding negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura (2,18%), Malaysia (1,26%), dan Thailand (0,48%) (LPDP, 2023). Sementara, dalam artikel "*Leveraging Digital Technology for Greater Inclusion in Indonesia*", disebut bahwa "Susenas 2023" mencatat penetrasi internet di daerah pedesaan 35,90% (UGM, 2023). Kondisi ini memperlihatkan bahwa mekanisme pasar semata tidak cukup untuk menjawab tantangan pembangunan, sehingga campur tangan negara menjadi mutlak.

Selain itu, tren penelitian lima tahun terakhir menunjukkan fokus yang meningkat pada peran administrasi publik dalam menghadapi kegagalan pasar, khususnya melalui keseimbangan regulasi dan inovasi kebijakan. Penelitian di Indonesia menyoroti hambatan implementasi kebijakan, kelemahan koordinasi antar lembaga, serta kebutuhan adaptasi terhadap dinamika sosial-ekonomi (Manar & Alfirdaus, 2023; Manganti, 2023; Wuryandari, 2021). Temuan ini menunjukkan adanya gap penelitian terkait strategi keseimbangan regulasi dan inovasi kebijakan di Indonesia, yang menjadi fokus penelitian ini.

Namun demikian, intervensi negara melalui administrasi publik di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan. Kelemahan koordinasi antar lembaga, birokrasi yang panjang, serta keterbatasan sumber daya sering kali membuat kebijakan tidak berjalan efektif. Bahkan, regulasi yang dirancang justru berpotensi menjadi penghambat ketika terlalu kaku dan tidak responsif terhadap dinamika teknologi. Di sisi lain, resistensi sosial juga muncul ketika masyarakat atau pelaku usaha merasa bahwa adopsi kebijakan baru hanya menambah beban, bukan memberikan solusi. Realitas ini memperlihatkan adanya jurang (*policy gap*) antara formulasi kebijakan di tingkat pusat dengan implementasi di lapangan (Nugroho, 2017).

Dalam konteks tersebut, peran administrasi publik menjadi semakin penting dan kompleks. Administrasi publik tidak hanya dituntut sebagai regulator yang mengendalikan pasar, tetapi juga sebagai inovator kebijakan yang mampu merespons dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Regulasi dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan publik, sedangkan inovasi kebijakan diperlukan untuk menciptakan adaptasi yang responsif dan relevan. Dengan keseimbangan keduanya, administrasi publik diharapkan mampu menghadirkan solusi komprehensif dalam mengoreksi kegagalan pasar sekaligus mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis peran administrasi publik dalam mengatasi kegagalan pasar dengan menekankan keseimbangan antara regulasi dan inovasi kebijakan;
2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural, administratif, dan sosial yang memengaruhi implementasi kebijakan di Indonesia;
3. Menawarkan strategi penguatan kapasitas administrasi publik agar mampu merespons dinamika kegagalan pasar di era modern.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang administrasi publik, khususnya dalam hubungannya dengan teori kegagalan pasar dan inovasi kebijakan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, birokrasi pemerintahan, maupun pemangku kepentingan lainnya mengenai pentingnya sinergi antara regulasi dan inovasi dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Untuk memahami peran administrasi publik dalam konteks tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi dokumentasi resmi dan literatur akademik.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam peran administrasi publik dalam mengatasi kegagalan pasar melalui regulasi dan inovasi kebijakan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks secara kontekstual melalui penafsiran makna, bukan sekadar pengukuran kuantitatif (Creswell, 2016). Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada dinamika perumusan hingga implementasi kebijakan publik, serta bagaimana administrasi publik berperan sebagai regulator sekaligus inovator.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposif di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan publik yang terkait dengan intervensi negara terhadap pasar, khususnya dalam penyediaan barang publik, pengendalian eksternalitas, dan pembangunan infrastruktur digital. Pendekatan purposif memungkinkan peneliti memilih konteks yang relevan dengan permasalahan penelitian (Sugiyono, 2019). Fokus penelitian diarahkan pada dua dimensi utama: regulasi sebagai instrumen formal negara untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat, serta inovasi kebijakan sebagai upaya adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder dari literatur dan dokumen resmi yang tersedia. Data ini mencakup regulasi, laporan kebijakan, dan publikasi dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta literatur akademik yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk menganalisis peran administrasi publik dalam mengatasi kegagalan pasar melalui regulasi dan inovasi kebijakan

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, meliputi analisis regulasi, laporan riset, artikel akademik, dan dokumen kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian mendapatkan gambaran komprehensif mengenai dinamika kebijakan publik tanpa memerlukan wawancara atau data primer lapangan.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2014). Pada tahap reduksi, informasi dari dokumen dan literatur dipilah dan difokuskan pada aspek relevan. Tahap penyajian menyusun data secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif. Tahap penarikan kesimpulan menghubungkan temuan dengan teori kegagalan pasar dan administrasi publik, menghasilkan interpretasi komprehensif mengenai peran regulasi dan inovasi kebijakan.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan berbagai dokumen dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat, dan literatur akademik, sedangkan triangulasi metode memanfaatkan studi dokumentasi dari beragam sumber untuk memastikan hasil penelitian memiliki dasar yang kokoh (Denzin, 2012; Patton, 2015).

Keterbatasan penelitian meliputi tidak adanya akses langsung ke wawancara dengan pembuat kebijakan di tingkat pusat serta keterbatasan observasi lapangan secara luas. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan analisis kualitatif deskriptif berbasis studi dokumentasi, sehingga tetap menghasilkan pemahaman yang valid, mendalam, dan relevan bagi pengembangan teori maupun praktik administrasi publik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kegagalan Pasar dan Urgensi Intervensi Administrasi Publik**

Analisis ini berbasis pada data sekunder dari dokumen resmi pemerintah, laporan BPS, dan publikasi akademik, sesuai dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dijelaskan pada metodologi. Tahap analisis mengikuti model interaktif Miles & Huberman (2014): reduksi data, penyajian naratif, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, dengan triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan.

Hasil analisis menegaskan bahwa kegagalan pasar di Indonesia bersifat multifaset. Laporan Badan Pusat Statistik atau BPS (2022) menunjukkan penetrasi internet di daerah perdesaan masih di bawah perkotaan, mencerminkan kesenjangan infrastruktur digital. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi digital di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagaimana dilaporkan dalam strategi ekonomi digital pemerintah. Situasi tersebut menegaskan bahwa intervensi administrasi publik diperlukan, baik dalam bentuk regulasi maupun inovasi kebijakan, agar pembangunan inklusif dapat tercapai. Temuan ini sejalan dengan teori Musgrave & Musgrave (1989) yang menekankan bahwa pasar gagal menyediakan barang publik dan mengoreksi eksternalitas tanpa intervensi negara.

Dari perspektif administrasi publik, teori inovasi publik sangat relevan. Kardiati (2023) menyatakan bahwa inovasi dalam birokrasi publik merupakan mekanisme penting untuk menyesuaikan administrasi dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, administrasi publik di Indonesia berperan ganda: sebagai regulator untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan publik, serta sebagai fasilitator inovasi untuk menyesuaikan kebijakan dengan dinamika sosial-ekonomi dan teknologi.

## **B. Hambatan Struktural, Administratif, dan Sosial**

Berdasarkan analisis dokumen kebijakan publik dan literatur akademik, hambatan administrasi publik dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. **Hambatan Struktural**  
Koordinasi antar lembaga masih menjadi tantangan utama. Hambatan struktural seperti fragmentasi birokrasi dan koordinasi antar lembaga menjadi tantangan serius bagi inovasi publik (Arnika et al., 2024; Whetsell et al., 2019). Tumpang tindih kewenangan antar kementerian dan minimnya mekanisme integrasi lintas lembaga membuat kebijakan inovasi sering berjalan parsial.
2. **Hambatan Administratif**  
Keterbatasan dana untuk inovasi publik di tingkat lokal menjadi hambatan signifikan. Kajian inovasi sektor publik di pemerintah daerah menunjukkan bahwa terbatasnya anggaran menunda pengembangan inovasi layanan (Susanti et al., 2020). Selain itu, birokrasi panjang dan keterbatasan SDM memperlambat implementasi kebijakan.
3. **Hambatan Sosial**  
Resistensi masyarakat terhadap teknologi dan rendahnya literasi digital, terutama di kalangan UMKM, juga menjadi penghalang. Resistensi terhadap inovasi seperti pembayaran digital dipicu oleh keterbatasan literasi digital, kurangnya pemahaman terhadap manfaat, serta kekhawatiran terhadap risiko transaksi digital (Zaimar et al., 2025). Artikel: Menutup Kesenjangan Digital: Studi tentang Meningkatkan Kehidupan UMKM Melalui Literasi Digital menekankan kebutuhan peningkatan literasi sebagai hambatan sosial (Saragih et al., 2024).

Analisis hambatan ini menegaskan bahwa regulasi saja tidak cukup; administrasi publik perlu merancang kebijakan inovatif yang mempertimbangkan kelembagaan, kapasitas birokrasi, dan edukasi sosial.

## **C. Regulasi sebagai Alat Kontrol dan Kepastian**

Dokumen kebijakan nasional menegaskan bahwa regulasi adalah instrumen utama untuk memberikan kepastian hukum dan mekanisme kontrol pasar. Namun, literatur inovasi publik memperingatkan bahwa regulasi yang terlalu kaku dapat menghambat fleksibilitas birokrasi. Kardiati (2023) menekankan pentingnya inovasi birokrasi agar regulasi tidak stagnan. Studi empiris di Indonesia mendukung hal ini. Santoso dkk (2023) menemukan paradoks inovasi pelayanan publik lokal: walaupun semangat inovasi tinggi, struktur birokrasi dan regulasi lokal kadang tidak mendukung perubahan cepat. Dengan demikian, regulasi harus diseimbangkan antara kepastian hukum dan fleksibilitas adaptif, agar administrasi publik dapat merespons dinamika modern.

## **D. Inovasi Kebijakan dan Strategi Administrasi Publik**

Berdasarkan dokumen kebijakan dan literatur, strategi inovasi kebijakan mencakup:

1. **Partisipasi Pemangku Kepentingan**  
Administrasi publik perlu melibatkan pemerintah lokal, masyarakat, dan sektor swasta dalam merumuskan kebijakan agar lebih inklusif dan relevan. Hal ini konsisten dengan teori *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008).

## 2. Komunikasi Adaptif

Untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan kebijakan inovatif, komunikasi harus adaptif, menggunakan bahasa dan media yang mudah diakses masyarakat. Strategi ini memperkuat penerapan prinsip *co-production* (Ostrom, 1996).

## 3. Penguatan Kapasitas Birokrasi

Birokrasi perlu diperkuat melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi digital, dan mekanisme internal agar inovasi dapat diimplementasikan secara efektif. Studi lokal menunjukkan bahwa inovasi publik di pemerintah daerah, seperti *Public Service Mall* (PSM), mampu meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan layanan publik (Farhan, 2023; Nur, 2023; Putra et al., 2024).

Analisis menunjukkan bahwa inovasi kebijakan di Indonesia tidak hanya teori, tetapi juga praktik transformasi birokrasi yang efektif. Interaksi antara partisipasi, komunikasi adaptif, dan kapasitas birokrasi menciptakan fondasi bagi administrasi publik yang proaktif, adaptif, dan berorientasi pada penciptaan nilai publik. Temuan ini memperlihatkan bahwa strategi inovasi yang menggabungkan partisipasi, komunikasi adaptif, dan kapasitas birokrasi merupakan model yang relevan untuk pengembangan administrasi publik di negara berkembang.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa administrasi publik memiliki peran strategis dalam mengatasi kegagalan pasar di Indonesia melalui keseimbangan antara fungsi regulasi dan inovasi kebijakan. Administrasi publik tidak hanya berperan sebagai regulator yang menjamin kepastian hukum, perlindungan masyarakat, serta pengawasan praktik pasar, tetapi juga sebagai inovator yang mendorong digitalisasi layanan publik, penguatan riset, dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih efisien dan inklusif. Namun, efektivitas peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai hambatan, meliputi hambatan struktural seperti lemahnya koordinasi antar lembaga dan tumpang tindih kewenangan, hambatan administratif berupa keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, serta prosedur birokrasi yang kompleks, dan hambatan sosial yang tercermin dari resistensi masyarakat serta rendahnya literasi digital, khususnya pada pelaku usaha kecil. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan administrasi publik dalam mengatasi kegagalan pasar sangat bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan stabilitas regulasi dengan fleksibilitas inovasi kebijakan, sehingga mampu merespons dinamika ekonomi digital dan kebutuhan masyarakat secara adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris implementasi kebijakan inovatif di sektor-sektor spesifik, seperti ekonomi digital atau UMKM, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur dampak kebijakan secara lebih terukur. Selain itu, studi komparatif antar daerah atau antar negara juga diperlukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dalam menyeimbangkan regulasi dan inovasi kebijakan, serta mengeksplorasi peran teknologi seperti kecerdasan buatan dalam meningkatkan kapasitas dan efektivitas administrasi publik.

\*Penulisan artikel ini dibantu oleh alat berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk penyempurnaan bahasa dan kejelasan redaksi, tanpa memengaruhi substansi ilmiah penelitian.

## REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arnika, M., Rifdan, R., Arief, M. M., Halid, A. A. waris, Taufik, A., & Hasrini, S. (2024). Collaboration Between Government Agencies: Challenges and Opportunities in Public Policy Implementation. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 14(2), 577. <https://doi.org/10.26858/jiap.v14i2.67934>
- Badan Pusat Statistik, B. P. S. (2022). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*. BPS-Statistics Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/08/31/131385d0253c6aae7c7a59fa/statistik-telekomunikasi-indonesia-2022.html>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering* (4th ed.). Routledge.
- Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2), 80–88.

<https://doi.org/10.1177/1558689812437186>

- Farhan, A. (2023). Inovasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Matra Pembaruan*, 7(2), 111–123. <https://doi.org/10.21787/mp.7.2.2023.111-123>
- Kardiat, Y. (2023). Inovasi Administrasi Publik. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 4(2), 143–149. <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3067>
- LPDP, L. P. D. P. (2023). *Indonesia Research Funding Report 2023*. LPDP. <https://www.lpdp.kemenkeu.go.id>
- Manar, D. G., & Alfirdaus, L. K. (2023). Analisis Kegagalan Inovasi Pemerintah Daerah. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 18–30. <https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.18-30>
- Manganti, G. S. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(11). <https://doi.org/10.56393/decive.v3i11.2053>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public finance in theory and practice. In *McGraw-Hill international editions TA - TT - (Fifth edit)*. McGraw-Hill Book Company. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/18224479>
- Nugroho, R. (2017). *Public policy*. PT Elex Media Komputindo.
- Nur, M. I. (2023). Mal Pelayanan Publik Sebagai Praktik Inovasi Pemerintah Daerah Di Wilayah Provinsi Jawa Barat. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 11(1), 97–116. <https://doi.org/10.30656/sawala.v11i1.6601>
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Ostrom, E. (1996). Crossing the Great Divide: Co-production, Synergy, and Development . In *World Development* (Vol. 24, Issue 6, pp. 1073–1087). [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(96\)00023-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(96)00023-X)
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4 (Ed.)). Sage Publications.
- Putra, F., Wike, W., Nurani, F., Ulum, M. C., Salsabilla, S. A., & Ferdhianzah, H. J. (2024). The Determinants for Policy Implementation: A Study of Public Service Mall Program in Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 20(2), 159–170. <https://doi.org/10.24258/jba.v20i2.1408>
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University Press.
- Santoso, R. S., Warsono, H., Sunu Astuti, R., & Hayu Dwimawanti, I. (2023). The Paradox of Public Service Innovation amid Regional Autonomy in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 22(1), 68–96. <https://doi.org/10.14710/jis.22.1.2023.68-96>
- Saragih, J. F. L., Faradilla, A. J., Nasution, R. A., Tafonao, D. F. A., Pitaloka, D., Amelia, B., & Dongoran, D. (2024). Menutup Kesenjangan Digital: Studi tentang Meningkatkan Kehidupan UMKM Melalui Literasi Digital. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1788–1795. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>
- Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of the Public Sector* (3rd (Ed.)). W. W. Norton & Company.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, G., Yani, A., Iva, M., Halwatiah, S., Hidayat, A., & Alfiana, A. (2020). *Barriers of Public Sector Innovation: A Case Study in The Alley Garden Program in Makassar City*. 9. <https://doi.org/10.4108/leai.21-10-2019.2291545>
- UGM, E. F. E. B. (2023). *Leveraging Digital Technology for Greater Inclusion in Indonesia*. EQUITAS FEB UGM. <https://www.equitas.ugm.ac.id/digital-inclusion>
- Whetsell, T. A., Leiblein, M. J., & Wagner, C. S. (2019). *Between Promise and Performance: Science and Technology Policy Implementation through Network Governance*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1903.07730>
- Wuryandari, R. D. (2021). Pekerja Migran Indonesia: Kasus Pekerja Perempuan Domestic Worker Sound Governance Perspective in Governance of Placement of Indonesian Migrant. *Journal of Governance and Administrative Reform.*, 2(2), 82–101. <https://e-journal.unair.ac.id/JGAR/article/download/33465/17056>
- Zaimar, F. R., Adriansyah, A., Haruna, H., Windarsari, W. R., & Ridha, A. (2025). Dinamika Resistensi dan Adopsi QRIS pada UMKM Makassar: Analisis Kualitatif dengan Pendekatan Teori Nudge. *Jurnal Liabilitas*, 10(2), 143–154. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v10i2.508>